

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya yang bertujuan utama sebagai pembawa perubahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat ditandai dengan peningkatan standart hidup manusia. Dalam meningkatkan standart hidup tersebut kebutuhan masyarakat harus dapat terpenuhi dengan adanya kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan beberapa faktor produksi antara lain sumberdaya alam. Berkaitan dengan hal tersebut maka proses pembangunan selalu dihadapkan dengan permasalahan yaitu keputusan pihak terkait atas kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa atau kelestarian sumberdaya alam. Pemilihan dua hal penting ini sulit dihindari karena kepentingan dan kondisi yang berbeda (Deky Aji Suseno, 2016).

Peningkatan jumlah penduduk akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut mewajibkan ketersediaan barang dan jasa untuk terus ditingkatkan. Implikasinya adalah sering terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan seringkali menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu ada keterkaitan antara pembangunan, ekonomi, dan masyarakat (Fauzi, 2004 dalam Deky Aji Suseno, 2016)

Suratmo, F. Gunawan (2004) memaparkan dalam bukunya bahwa pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan tersebut haruslah memberikan dampak positif bagi

masyarakat setempat, provinsi, nasional, maupun internasional. Pembangunan akan memanfaatkan sumberdaya alam secara terus-menerus guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas jumlahnya, sedangkan permintaan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan produk dan jasa yang jumlahnya terus bertambah. Kegiatan pembangunan yang terus meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.

Masyarakat harus merasakan dampak positif yang dihasilkan dari pembangunan di suatu negara. Dalam artian bahwa yang dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut bukan hanya seseorang individu maupun sekelompok masyarakat namun harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di suatu negara, misalnya seperti peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan nilai-nilai kebersamaan, serta peningkatan kesejahteraan penduduk.

Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan menekankan pada pembangunan fisik. Pembangunan ekonomi pada umumnya diartikan sebagai sebuah proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang (Suratmo, F. Gunawan, 2004). Todaro (1997) dalam bukunya memaparkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian dari

pembangunan. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik dalam pekerjaan, pendapatan, sosial serta kebudayaan.

Pembangunan ekonomi harus dijalankan oleh tiap negara, sekalipun negara itu sudah sejahtera atau dalam keadaan makmur. Keadaan makmur ini harus bisa dipertahankan dan akan lebih baik jika kemakmuran dapat ditingkatkan. Maka dari itu pembangunan ekonomi harus terus berlanjut di setiap negara. Bagi negara yang sudah maju, mereka memfokuskan pembangunan ekonomi pada sektor teknologi dan informasi. Sedangkan pada negara berkembang seperti Indonesia ini lebih ditekankan pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan tol, pembangunan gedung-gedung, maupun pembangunan bandara. Hal ini terjadi karena pada negara berkembang masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana (Hasan & Azis, 1999).

Pembangunan ekonomi yang dijalankan pada suatu negara dapat mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan negara namun dampak negatif sangat merugikan masyarakat dan negara. Strategi dalam pembangunan ekonomi dijadikan acuan dalam menjalankan pilihan. Oleh karena itu dalam kegiatan pembangunan ekonomi pasti terdapat dua hal yang bertentangan, seperti mempertahankan kelestarian lingkungan atau meningkatkan ketersediaan produksi barang dan jasa. Kebijakan yang dipilih masing-masing tentunya memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan yang diambil dalam pembangunan haruslah bijaksana agar dapat meminimalisir kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan dan dapat

meningkatkan kemakmuran masyarakat dan negara. Karena pada dasarnya pembangunan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan

Adanya proses pembangunan ekonomi di Indonesia mengharuskan pemerintah beserta pihak perusahaan berupaya untuk membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan tol dan bandar udara. Hal itu akan menyebabkan permintaan akan lahan terutama lahan pertanian sebagai tempat penyedia agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat terwujud. Pembangunan tersebut dapat mengakibatkan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, beralihnya fungsi lahan pertanian ini dapat disebut sebagai alih fungsi lahan (MUSTOPA, 2011).

Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh bagian lahan menjadi fungsi lainya seperti lahan pertanian menjadi lahan perkebunan ataupun menjadi kawasan sektor industri dan perumahan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan disekitarnya. Alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat dari pembangunan serta pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat (Janti, 2016).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami banyak kasus alih fungsi lahan yang menyebabkan luas areal persawahan menurun dan mengakibatkan jumlah produksi beras berkurang cukup banyak, khususnya di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah tabel Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah di Kecamatan Temon tahun 2015-2019

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (kw/ha)
2015	1 980	12 750	64,39
2016	1 981	12 343,2	62,2
2017	1 763,1	10 728,9	60,85
2018	1 741	11 374	65,3
2019	1 805	11 798	65,37

Sumber data: (BPS Kabupaten Kulonprogo, 2020)

Luas wilayah Kecamatan Temon adalah 3.629,09 Hektar atau hanya 6,19 persen dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2015, luas lahan padi sawah yang dipanen sebesar 1.980 Ha dan memiliki jumlah produksi padi sawah 12.750 ton. Pada tahun 2016, luas lahan padi sawah yang dipanen sebesar 1.981 Ha dan memiliki jumlah produksi padi sawah sebesar 12.750 ton. Pada tahun 2017, luas lahan padi sawah yang dipanen sebesar 1.763,1 Ha dan memiliki jumlah produksi padi sawah sebesar 10.728,9 ton. Pada tahun 2018, luas lahan padi sawah yang dipanen sebesar 1.741 Ha dan memiliki jumlah produksi padi sawah sebesar 11.374 ton. Pada tahun 2019, luas lahan padi sawah yang dipanen sebesar 1.805 Ha dan memiliki jumlah produksi padi sawah sebesar 11.798 ton. (BPS Kabupaten Kulonprogo, 2020)

Alih fungsi lahan di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo disebabkan oleh beberapa faktor. Satu yang paling besar faktor penyebab alih fungsi lahan di Kecamatan Temon adalah pembangunan bandara YIA.

Pembangunan bandara YIA ini berada di atas lahan produktif seluas 568 hektar. Terdapat lima desa di Kecamatan Temon yang terdampak oleh pembangunan bandara ini, yaitu Desa Palihan, Glagah, Sindutan, Kebonrejo, dan Desa Jangkar. Dari kelima desa yang terdampak, tercatat Desa Glagah dan Desa Palihan adalah desa yang terkena dampak paling luas. (Faujiah & Rubiyannah, 2020)

Masalah yang terjadi tentang pembangunan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal ini ialah salah satu dari sekian banyak permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia (Faujiah & Rubiyannah, 2020). Beliau juga menuturkan bahwa pada tanggal 27 november 2017 pihak Angkasa Pura mulai mempersiapkan lahan yang akan dibangun bandara YIA dengan mengosongkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bandara.

Pembangunan Bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) merupakan salah satu megaproyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diterjemahkan kedalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Pembangunan Bandara di Kulon Progo berdasarkan Perpres Nomor 48 tahun 2014 adalah salah satu program prioritas dikoridor ekonomi Jawa. Penyediaan infrastruktur transportasi Bandar Udara di Yogyakarta menjadi kebutuhan ditengah keterbatasan layanan Bandara Adisutjipto. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyetujui adanya rencana pembangunan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan mengesahkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional dan Perpres Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. (Faujiah & Rubiyannah, 2020)

Implementasi kebijakan pembangunan bandara telah menambah catatan buruk terhadap konflik agraria di Indonesia, pembangunan yang melibatkan lahan seluas 645,63 hektar dan terdapat 3.444 bidang tanah milik masyarakat ini mengancam pemindahan rumah atau relokasi rumah 2.875 Kepala Keluarga, serta 11.501 jiwa ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pihak angkasa pura. (Faujiah & Rubiyannah, 2020)

Hal ini lah yang membuat peneliti memilih desa Palihan di kecamatan Temon pada padukuhan Pragon II dan Monggangan sebagai lokasi penelitian, pemilihan dua pedukuhan ini dikarenakan pedukuhan Pragon II dan Monggangan merupakan salah satu pedukuhan yang telah melakukan relokasi dan berpindah tempat tinggal pada lokasi baru, hal lainnya dikarenakan desa Palihan pada Kulon Progo dalam angka (2020), memiliki luas lahan sawah sebesar 71,70 ha, 146,53 ha lahan kering dan 53,34 ha lahan bangunan menjadikan desa Palihan sebagai desa terluas ketiga di kecamatan temon setelah desa Glagah dan desa Jangkar dengan luas keseluruhan lahan 358,71 ha atau sebesar 9,88% dari luas keseluruhan Kecamatan Temon serta jumlah masyarakat desa Palihan sebesar 2.327 jiwa menjadikan desa Palihan sebagai desa dengan penduduk terbanyak ketiga di kecamatan temon setelah desa Glagah dan desa Kulur (BPS Kabupaten Kulonprogo, 2019).

Pembangunan bandara ini menuai berbagai macam tanggapan dari semua elemen masyarakat yang terdampak, hal ini mengakibatkan munculnya kelompok pro

maupun kontra pada pembangunan bandara, hal ini dapat memperburuk interaksi sosial antara masyarakat. ditambah lagi dengan dampak pada mata pencaharian petani dan pendapatan dikarenakan hilangnya lahan untuk bekerja, oleh karena itu dampak pembangunan bandara terhadap sosial ekonomi petani di desa Palihan menjadi hal yang menarik untuk di kaji, adanya sikap pro dan kontra menimbulkan konflik sosial di masyarakat desa Palihan karena memiliki kepentingan yang berlainan.

Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perubahan sosial ekonomi pada petani terdampak. Dengan permasalahan yang ada maka peneliti membuat judul penelitian dengan judul “DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA YIA TERHADAP SOSIAL EKONOMI PETANI DI DESA PALIHAN”

B. Tujuan

1. Mendeskripsikan proses alih fungsi lahan petani di desa Palihan yang terdampak pembangunan bandara.
2. Mendeskripsikan dampak dari alih fungsi lahan terhadap sosial ekonomi petani yang terdampak pembangunan bandara di desa Palihan.

C. Kegunaan

1. Bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan bidang Pengantar Ekonomi Pertanian yang dipelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

2. Bagi pemerintah daerah maupun pusat, informasi ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pembangunan bandara di kabupaten Kulon Progo.
3. Bagi civitas akademi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.